Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik
ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |
DOI:10.25077/jakp | Website: http://jakp.fisip.unand.ac.id |

MANAJEMEN PENGEMBANGAN SAGU DI KAMPUNG SIMPORO DISTRIK EBUNGFAUW KABUPATEN JAYAPURA

Muhammad Ismail[1*]
[1]Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua, Papua, Indonesia

[*]ismailpapua20@gmail.com

Dikirim : 10/11/2021
Diterima : 18/03/2022
Terbit : 21/04/2022

Abstract

The economic development of the sago processing community is still working on the spot. Creation in processing and consumption patterns of the community is a problem that must be solved. One of them is by creating proper and good sago processing management. The purpose of this study is to find out how to manage sago development with SWOT analysis. The results showed that sago development management was still lacking in terms of planning, organizing and supervising. This is because the sago has not yet been established as one of the leading commodities of the Jayapura Regency Government. Inhibiting/weakness factors in efforts to develop the community's economic in Simporo Village are pounded on a traditional sago management system, lack of guidance and assistance for the community of sago management, community consumption patterns have begun to switch to rice, lack of business capital, and lack of diversity of products based on sago products . The results of the SWOT analysis showed that the position of the mapping of the X -axis analysis was -0.374 (negative) and the Y -axis of 0.220 (positive), so that the policy position was in the third quadrant (III) meaning it was advisable to change the previous strategy that was considered unable to improve the welfare of the community.

Keywords: Economic Development; Management; Empowerment

Pendahuluan

Manajemen pengembangan sagu merupakan salah satu aset menjaga degradasi potensi lokal di masa mendatang. Sudah lama bangsa kita mengenal sagu, karena sagu bukanlah hal yang baru bagi negara kita. Data empiris menyebutkan Indonesia memiliki lebih dari 90 % lahan sagu di dunia. Potensi sagu terbesar terdapat terdapat di Provinsi Papua dan Papua Barat sekitar 85 % lahan sagu. Prakteknya, hanya sekitar 0,1% dari total area sagu nasional yang dapat termanfaatkan dengan baik. Ironis melihat terbengkalainya sagu yang kaya di Indonesia menjadi kewajiban Pemerintah untuk membangkitkan sagu sebagai aset lokal di wilayah timur (Bantacut, Tajuddin, MH. Bintoro, 2020). Cara yang paling tepat adalah,

dengan membangkitkan pemanfaatan sagu, dimulai dari kreasi cara mengolah memadupadankan tidak hanya berupa pangan saja namun kita dapat mengolahnya menjadi bahan industri tekstil dengan proses pemintalan sagu yang digunakan sebagai penyambung serat.

Alternatif pengolahan sagu menjadi solusi untuk merubah manajemen pengolahan sagu tetap menjadi tuan rumah di provinsi papua dan papua barat. Padahal kampung-kampung sudah marak menjadikan sagu sumber penghasilan sekaligus ajang pengenalan daerah sebagai penghasil sagu terbesar di dunia. Masyarakat wilayah timur tidak sungkan untuk berani mengusung diri dengan menghasilkan karya sagu yang potensial. Apalagi ada anggapan bahwa sagu dianggap sebagai salah satu menjaga keberlangsungan pangan di samping produktivitas padi (M. Luhukay, R.G. Risamaul, 2019). Maknanya adalah sagu bukan satu-satunya pangan di Indonesia, tetapi sagu dapat menjadi kunci alternatif pangan yang tepat dikonsumsi masyarakat.

Pada dasarnya faktor rendahnya pemanfaatan sagu bisa disebabkan karena (1) kurangnya minat masyarakat dalam mengelola sagu seperti memproduksi tepung sagu, (2) rendahnya kemampuan dalam mengolah tepung sagu menjadi bentuk-bentuk produk lanjutannya, (3) kondisi geografis dimana habitat tanaman sagu umumnya berada pada daerah marginal/rawa-rawa yang sukar dijangkau, dan (4) adanya kecenderungan masyarakat menilai bahwa pangan sagu tidak superior seperti halnya beras dan beberapa komoditas karbohidrat lainnya. Selain Pemanfaatannya yang tidak maksimal, upaya pelestariannya pun sangat lemah. Salah satu contoh di Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura sebetulnya sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2000 tentang Pelestarian Kawasan Hutan Sagu. Regulasi saja tidak cukup untuk mempertahankan sagu, namun dibutuhkan manajemen pengolahan sagu yang tepat dalam menghadapi alih fungsi hutan sagu yang terus terjadi. Baik untuk infrastruktur, perkebunan, pangan, dan investasi berbasis lahan lainnya.

Perlu diketahui bahwa sagu memiliki manfaat multifungsi. Kajian (Mamun Murod, Cecep Kusmana, Mochamad H Bintoro, nfn Widiatmaka, 2020) menyatakan bahwa sagu dapat mendukung perekonomian masyarakat. Sagu juga dapat mendorong penyerapan tenaga kerja. Selain itu tanaman sagu dapat bermanfaat terhadap keseimbangan lingkungan terutama adalah menampung air dari lingkungan sekitarnya, melindungi sungai akibat pencucian materi serta membantu infiltrasi (penyerapan) aliran air dan air hujan masuk kedalam tanah, mengurangi volume air di permukaan dan mencegah banjir. Sedangkan hambatan pengembangan sagu berdasarkan kajian santoso (2017) menitikberatkan pada (a) kurangnya perhatian pemerintah, (b) terbatasnya pasar bagi pangan sagu dan produk olahannya, (c)

pemanfaatan teknologi pengolahan sagu di tingkat lokal masih sederhana, (d) kurangnya investasi pemerintah dan swasta terhadap sumber daya alam sagu, (e) Beratnya Persaingan Pangan Sagu terhadap Sumber Pangan lainnya, dan (f) Hutan/Medan Sagu Sulit Dijangkau. Artinya pengembangan sagu mengalami kendala yang dititikberatkan pada manajemen dalam mengelola sagu di Indonesia.

Pengolahan sagu praktiknya tidak hanya dilakukan oleh masyarakat saja, tetapi industri masih mendominasi sektor berbahan sagu ini. Seperti Kajian Hasanudin (2016) mengingatkan, industri sagu sejalan di lapangan masih teratas nilainya daripada sumber pangan lainnya. Sehingga semestinya sagu dapat menjaga posisinya sebagai pangan terbaik di Indonesia. Contohnya Papua dan Papua Barat bermodalkan sagu menjadi sektor utama di wilayah Timur. Perlu diketahui, hutan sagu di Provinsi Papua memiliki luas sekitar 4.769.548 hektar dan dimanfaatkan secara tradisionil sekitar 14.000 hektar. Namun tidak ada produksi yang tanpa mengalami kendala, implementasinya sagu di Papua dihadapkan pada kendala yaitu masalah infrastruktur. Dimana di Papua, warga kesulitan memasok sagu rakyat ke pabrik sagu besar, sedangkan pabrik sagu besar sulit menyalurkan hasil produksi keluar, karena keterbatasan infrastruktur. Akibatnya, biaya logistik bisa mencapai 30% dari biaya produksi. Selain itu, ada masalah ketersediaan listrik di Indonesia bagian timur," Sebagaimana yang diungkapkan Bambang Hariyanto (Gora Gunjana, 2016). Maknanya bahwa sagu tidak hanya dihadapkan pada bagaimana mengolah, tetapi bagaimana menyediakan perangkat dan bagaimana menjaga keberlanjutan pengolahan sagu. Apalagi di era 4.0 dengan segala kemudahan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi dan memperoleh bahan baku, sehingga sagu tidak mengalami krisis pemasok dan krisis konsumen.

Mempertahankan sagu memang tidak mudah, apalagi bila tidak ada atensi untuk menciptakan sagu sebagai alternatif pangan. Metode pengolahan dipandang untuk menjaga agar hutan sagu tidak habis. Melestarikan hutan sagu berarti menjaga ketahanan pangan. Jika sagu tidak ada lagi di Papua, maka kebutuhan akan sagu harus mengimpor dari daerah lain atau bahkan dari negara tetangga Papua New Guinea. Pengambilan bahan baku di negara lain konsekuensinya adalah membuat makanan sagu akan menjadi sangat mahal jika bahan dasarnya import dari wilayah lain. Tentu saja akan semakin menjeratkan masyarakat lokal dalam memperoleh bahan sagu, dan hal ini yang akan memposisikan sagu sebagai makanan yang sulit dikonsumsi karena mahalnya sagu diperoleh. Imbasnya krisis konsumen dan krisis pemasok sagu menjadi permasalahan baru. Kebijakan di Kabupaten Jayapura sebagaimana dikutip oleh Wulandari (2021) justru melarang adanya bibit sagu di luar daerah tetapi wajib memanfaatkan pohon sagu lokal. Hal ini dipandang bibit lokal akan sesuai dengan tanah yang

ada sehingga akan tumbuh subur di daerah asalnya.

Dari segi budidaya sagu, sebanyak 8 juta ton sagu per tahun yang tumbuh hilang dan belum termanfaatkan. Opu (2019) menganggap bahwa sagu memiliki banyak kelebihan yaitu sagu tidak perlu lahan yang luas, sagu bisa menjadi aset bangkitnya pangan di Indonesia, dan sebagainya. Dengan fakta tersebut, pemerintah seharusnya dapat melihat ini sebagai kesempatan untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen sagu terbesar di dunia dan juga komponen utama untuk mensejahterakan rakyat di Indonesia bagian timur. Sebagai daerah yang memilki potensi sagu yang sangat besar, masyarakat sebagai pemilik potensi sagu secara maksimal belum memberikan manfaat secara ekonomi. Untuk itu diharapkan adanya kebijakan yang memihak kepada para petani tersebut agar mereka dapat bangkit untuk mengelolanya. Di sisi lain, sudah banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah, namun dampak yang dirasakan oleh masyarakat terlihat belum optimal yang ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya Indeks pembangunan manusia (IPM) serta permasalahan pembangunan lainnya.

Ada 4 komponen kemampuan yang termasuk dalam kapasitas pengelola sagu, yaitu: (1) mengolah sagu, (2) mengembangkan pemasaran dimana berdasarkan kajian (Surni et al., 2020) pemasaran tepung sagu masih terbatas untuk memenuhi permintaan domestik di Indonesia, (3) mengidentifikasi dan memecahkan masalah, dan (4) menjaga keberlanjutan sumber daya sagu. Keempat komponen kapasitas ini dibutuhkan pengelola sagu agar dapat memanfaatkan sagu secara optimal yang tidak hanya akan meningkatkan pendapatan usaha sagu, tetapi juga meningkatkan ekonomi daerah, mendukung pencapaian ketahanan pangan, serta melestarikan norma budaya masyarakat Papua yang berkaitan dengan sagu.

Menurut (Tahitu, 2016) Peningkatan pemanfaatan dan daya saing sagu membutuhkan pengelola sagu dengan kapasitas yang baik. Karena itu, pengembangan kapasitas pengelola sagu penting dilakukan dan membutuhkan strategi yang tepat untuk melakukannya. Terdapat empat prioritas strategi untuk peningkatan pemanfaatan sagu, yaitu: (1) Penyiapan pengelola sagu untuk meningkatkan pemanfaatan sagu, (2) Penyiapan penyuluh/tenaga pendamping yang berkompeten di bidang pengelolaan sagu, (3) Penguatan kesadaran dan pengakuan masyarakat terhadap fungsi sosial dan budaya sagu untuk menjamin keberlanjutan usaha pemanfaatan sagu sebagai salah satu budaya Maluku, dan (4) Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan program pengembangan sagu antar lembaga pemerintah dengan pihak-pihak terkait.

Dalam implementasinya, upaya pengembangan kapasitas pengelola sagu bukan merupakan hal yang mudah dilakukan. Diperlukan kajian yang komprehensif terhadap semua faktor

yang terkait dengan perilaku usaha pemanfaatan sagu yang dilakukan selama ini dan dukungan lingkungan yang ada. Oleh karenanya kajian ini akan memandang dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sebagai salah satu unsur manajemen. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menyusun strategi yang sesuai untuk mengembangkan ekonomi masyarakat pengelola sagu di Kampung Simporo berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Kajian ini akan berbeda dengan kajian lainnya karena kajian ini secara spesifik melihat pengembangan sagu berdasarkan konsep manajemen.

Sementara itu maksud dan tujuan dari dilaksanakan kajian ini adalah untuk melihat sejauh mana upaya pengembangan ekonomi masyarakat pengelola hutan sagu melalui studi kasus di Kampung Simporo Kabupaten Jayapura. Tujuannya adalah untuk menyusun strategi yang sesuai untuk mengembangkan ekonomi masyarakat pengelola sagu di Kampung Simporo berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, dengan mengambil lokasi yang menjadi studi kasus di Kampung Simporo Distrik Ebungfau. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan potensi sagu yang dimiliki oleh Kampung simporo yang sangat besar serta lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau. Sementara itu waktu pelaksanaan kegiatan penelitian ini selama 5 (lima) bulan yang terhitung dari bulan Juli sampai dengan bulan Nopember tahun 2018**.**

Untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder maka teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Wawancara : dilakukan untuk melengkapi data yang dirasa perlu terhadap orang/tokoh masyarakat yang dianggap sebagai narasumber, Focus Group Discution (FGD) yang dilakukan dengan cara mengundang keterwakilan dari kelompok masyarakat adat dan dari pihak pemerintah. Kuesioner berupa daftar isian pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data kepada responden. Kuesioner menggunakan cara pertanyaan terbuka dan tertutup. Serta pengumpulan data dengan cara menelusuri data yang bersumber dari Instansi, dan atau lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan kegiatan dimaksud.

Sementara itu metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu salah satu jenis alat analisis yang dapat digunakan untuk menggambarkan perkembangan sebuah masalah secara apa adanya serta analisi SWOT yaitu analisis yang

terdiri dari *Strength* (kekuatan), *Weaknes* (Kelemahan), *Opportunity* (kesempatan), dan *Threat* (ancaman). Analisis ini dilakukan melalui telaah terhadap kondisi *internal*, serta analisis mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi unit penelitian yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi *eksternal.* Setelah diperoleh berbagai faktor kunci eksternal dan internal yang dituangkan dalam analisis kebijakan/strategi pengembangan.

Hasil Dan Pembahasan

Sebagai upaya untuk mengidentifikasi permasalahan pengelolaan sagu di Kabupaten Jayapura, maka yang perlu di pertimbangkan terkait pengembangan ekonomi masyarakat yaitu manajemen pengelola sagu yang dapat diukur melalui 4 (empat) karakteristik, yaitu kemampuan mengolah sagu dilihat dari perencaaan, mengembangkan pemasaran dari sisi pengorganisasian, mengidentifikasi dan memecahkan masalah dari aspek pengarahan untuk menggerakkan masyarakat dalam mengatasi masalahnya sendiri dan menjaga keberlanjutan sumber daya sagu lebih didominasi faktor kebiasaan yang diwariskan dari generasi sebelumnya sehingga menjurus kepada rutinitas kegiatan, hal ini menjadi aspek pengawasan.

Manajemen pengolahan sagu merupakan cara untuk bagaimana menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai target yang telah ditentukan yaitu termanfaatkanya potensi sagu di daerah lokus. Dengan manajemen yang baik pula diharapkan dapat menjadi celah masuknya kebijakan yang membuat sagu semakin diminati tidak hanya dikalangan wilayah Timur tetapi bisa merasuk daerah lain di Indonesia terutama dari segi pemasaran produk dan peningkatan kualitas produk. Sebagaimana kajian Adrianto (2018) menyatakan bahwa perubahan manajemen menjadi solusi untuk menghadapi kendala dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Dari yang sudah terungkap memang manajemen yang baik adalah manajemen terukur dengan mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi. Jadi bukan hanya yang ada di depan mata saja, tetapi kemungkinan yang tentunya akan berimplikasi terhadap keberlangsungan sagu.

Kondisi di Kampung Simporo dapat merubah kebiasaan yang awalnya tradisional untuk saat ini sudah dibantu dengan teknologi. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa pada dasarnya masyarakat sudah ada keinginan untuk merubah kebiasaan. Otomatis kapasitas pengelola sagu di Kampung Simporo berpotensi untuk dikembangkan melalui teknologi pengelolaan komoditi pertanian termasuk sagu yang terus berkembang. Seperti kajian (Tahitu, 2016) bahwa untuk meningkatkan kemampuan mengelola sagu di Maluku Tengah adalah dengan mengembangkan kapasitas pengelola sagu. Aspek rutinitas dan kebiasaan yang diwariskan

dalam mengolah sagu terlihat dari produk yang dihasilkan pengelola sagu yang sulit berkompetisi dengan produk sagu dari daerah lain, terlebih lagi untuk menjangkau pasar luar negeri. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki, terbatasnya informasi yang tersedia dan dapat diakses, serta sumber daya terutama modal yang tidak mencukupi seperti ditemukan pada umumnya produsen berskala kecil.

Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa secara umum pengolahan sagu di Kabupaten Jayapura khususnya di Kampung Simporo memiliki banyak permasalahan atau kelemahan yang perlu dicarikan solusi pemecahan melalui strategi dan kebijakan yang memihak kepada masyarakat adat pemiliki hutan sagu. Gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Subsistem Hulu.

   Dari hasil penelitian di lapangan memang ditemukan salah satu masalah yaitu sistem pengelolaan pohon sagu masih secara tradisionil sehingga akan berdampak pada hasil produksi. Untuk itu diharapkan agar kedepan pemerintah daerah perlu memberikan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan sagu dan pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana terkait. Selain itu peran BPPT Sentani dan Balitbang kabupaten dan Provinsi Papua sebagai lembaga riset yang ada di Papua juga berperan aktif dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan sagu.

b. Subsistem Usaha Tani

   Kabupaten Jayapura memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pengembangan usaha tani. Dari hasil penelitian di lapangan, terlihat bahwa pohon sagu yang dimiliki masyarakat masih tumbuh secara liar. Padahal sagu merupakan komoditas unggulan yang mesti ditangani secara benar. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam memajukan budidaya sagu adalah ketersediaan sumber daya manusia. Masyarakat sekitar masih dikatakan sebagai masyarakat produktif namun karena rendahnya tingkat pendidikan petani dan kurangnya pendidikan dan pelatihan dari pemerintah maupun swasta menjadikan batu sandungan bagi masyarakat untuk berkembang. Untuk itu diharapkan agar upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas dalam pengembangan sagu, dengan sasaran utama adalah para petani Orang Asli Papua (OAP) yang secara sosial ekonomi juga masih sangat rendah.

c. Subsistem Pengolahan

   Pasca Panen Permasalahan pasca panen juga masih menjadi masalah serius yang sampai hari ini seakan-akan pemerintah sulit menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan olah petik jual disebabkan masih kurangnya jaringan kerjasama antar

lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Masing-masing sektor terkesan jalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas, sektor pertanian dan perkebunan sudah menjalankan program pengembangan usaha tani namun dukungan dari sektor lain belum terlalu terlihat seperti sektor perindustrian dan perdagangan yang mengelola pasca panen tersebut. Untuk itu dperlukan adanya kerja sama antar lembaga sebagai upaya mendukung program pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.

d. Subsistem Penunjang

Dari hasil identifikasi juga diperoleh gambaran bahwa pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan salah satu peluang bagi pemerintah Papua karena amanat undang-undang Otonomi Khusus nomor 21 tahun 2001 yang memberikan kewenangan secara luas kepada pemerintah dan masyarakat asli Papua untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui pemberdayaan keberpihakan secara ekonom, pendidikan dan kesehatan, sebagai jawaban atas berbagai permasalahan mendasar yang terjadi bagi masyarakat Papua selama ini. Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat pengolah kebun di kabupaten Jayapura Provinsi Papua adalah kurangnya akses terhadap modal usaha serta. kurangnya peran tenaga penyuluh dan pendamping bagi para petani yang masih membutuhkan pembinaan dan pendampingan secara kontinyu dan berkelanjutan. Permasalahannya adalah masih rendah secara kualitas dan kuantitas sehingga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, khususnya dinas perkebunan agar menyiapkan tenaga penyuluh dan pendamping yang siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. Subsistem Pemasaran

Permasalahan pemasaran masih merupakan masalah klasik yang dihadapi masyarakat. Selama ini, para petani sangat sulit untuk mendapatkan akses pasar karena kurangnya kebijakan pemerintah yang dapat menunjang hasil petani melalui pemasaran hasil produk. Selain masalah akses pasar yang kurang baik, permasalahan harga yang belum stabil juga sangat berdampak terhadap motivasi petani untuk lebih meningkatkan kuantitas produknya. Menurut informasi dari responden bahwa harga tepung sagu belum stabil karena dipengaruhi oleh mekanisme pasar, tingkat permintaan masyarakat terhadap sagu juga masih rendah. Padahal sagu merupakan makanan pokok orang Papua. Selain itu sampai saat ini belum memiliki regulasi yang kuat untuk menstabilkan harga komoditas sagu .

Permasalahan yang dihadapi Kampung Simporo dilatarbelakangi adanya faktor internal dan faktor eksternal yang menjadikan Kampung ini kesulitan untuk mengolah sagu. Berdasarkan hasil penelitian di Kampung Simporo telah 12 (dua belas) faktor internal yang terdiri dari 5 (lima) kekuatan (*Strengths*) dan 7 (tujuh) kelemahan (*Weaknesses*) yang mempengaruhi kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat pengelola sagu di Kampung Simporo Distrik Yabungfau kabupaten Jayapura. Faktor-faktor kekuatan yang teridentifikasi meliputi:

Tabel 1. Faktor Internal dan Eksternal Pengelolaan Sagu

Identifikasi Faktor		
Faktor Internal	**Kekuatan**	**Kelemahan**
	1. Memiliki potensi hutan sagu	1. Pengelolaan sagu masih tradisionil
	2. Memiliki Kebijakan pemberdayaan masyarakat	2. Kurangnya pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat pengelola sagu
	3. Sagu memiliki nilai sosial budaya	3. Pola konsumsi masyarakat sudah mulai beralih ke beras
	4. Sagu sebagai sumber pendapatan masyarakat	4. Kesulitan mendapatkan modal usaha
	5. Pohon sagu memiliki banyak manfaat ekonomi	5. Kurangnya penganekagaman produk berbahan dasar sagu
		6. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan
		7. Terbatasnya alat pengolah sagu
Faktor Eksternal	**Peluang**	**Ancaman**
	1. Memiliki potensi pasar/eksport yang besar	1. Sagu bukan komoditas unggulan
	2. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2000 tentang Pelestarian Kawasan Hutan Sagu	2. Bantuan mesin pengolah sagu tidak sesuai kebutuhan masyarakat
	3. Memiliki Kebijakan program pemberdayaan masyarakat	3. Kebijakan beras untuk rakyat miskin (Raskin)
	4. Dukungan BPPTP dan Balitbangda (Kabupaten dan Provinsi)	4. Lemahnya koordinasi antar lembaga

	5. Dukungan modal usaha dari perbankan	5. Konversi lahan sagu cenderung meningkat
	6. Pengembangan budidaya pohon sagu	

Sumber : Data Lapangan, 2018

Seperti yang terurai pada tabel 1, bila dikaitkan dengan manajemen pengolahan sagu faktor internal (kekuatan dan Kelemahan) adalah faktor yang menjadi penguatan di sektor perencanaan dan pengorganisasian. Faktor eksternal (Peluang dan Ancaman) menjadi potensi untuk mengatasi kemungkinan yang akan terjadi. Faktor eksternal adalah hal-hal yang tidak dapat dikendalikan oleh masyarakat/petani yang terdiri dari peluang dan ancaman dalam pengembangan ekonomi masyarakat pengelola hutan sagu di Kabupaten Jayapura. Pihak eksternal adalah pemerintah pusat yaitu Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Papua, konsumen dan pesaing. Faktor eksternal yang diidentifikasi berupa kebijakan pemerintah pusat, kondisi pesaing, pasar domestik, regional dan global, kondisi politik daerah, dan faktor eksternal lainnya yang memberikan peluang dan ancaman bagi pengembangan ekonomi masyarakat pengelola sagu.

a. Perencanaan Sagu

   Perencanaan sagu adalah memilih dan mengartikulasikan fakta-fakta yang akan terjadi di masa mendatang untuk mencapai tujuan (Siagian, 2012). Tahap perencanaan pengelolaan sagu dimulai dari Pertama ketersediaan lahan sagu di daerah lokus. Kampung Simporo memiliki hutan sagu sekitar 100 hektar dengan sistem pengelolaan masih tradisional dengan tenaga kerja petani saja. Terdapat 5 jenis sagu yaitu sagu phara, sagu yebha, sagu onsukhulu, sagu yakhalobe dan sagu rondo. Kedua, posisi sagu yang strategis di Kampung Simporo menjadikan modal untuk mengembangkan sagu di masa depan. Ketiga peminatan pengolahan sagu sangat tinggi, Keempat tumbuhnya keyakinan masyarakat bahwa sagu dapat merubah perekonomian keluarga. Kelima inovasi pengolahan sagu.

   Perencanaan sagu di Kampung Simporo menghasilkan beberapa hal yaitu pengolahan sagu akan diarahkan pada tataran bisnis, dimana masyarakat secara teknis akan melaksanakan kegiatan menciptakan lapangan pekerjaan, menyiapkan infrastruktur dan mempersiapkan dana tunai pemberian kredit lunak bagi masyarakat melalui KUR. Selain itu juga adanya pendampingan lokal dari pemerintah daerah setempat dengan melibatkan unsur teknologi dalam membantu pangan lokal dengan spesifikasi budidaya sagu.

b. Pengorganisasian Sagu

Pengorganisasian sagu adalah aksi yang bersinergi dengan unsur terkait untuk bekerjasama secara efektif dalam budidaya sagu sehingga terpenuhinya kelestarian sagu dengan mengatasnamakan kepentingan bersama. Pengorganisasian sagu ini tidak bisa terlepas dari aparat pemerintah daerah yang konsentrasi dalam pengembangan sagu. Meski sagu mendominasi, namun akan lebih baik apabila sagu dapat dimaksimalkan dan dioles dengan manajemen profesional baik dari segi pengolahan anggaran maupun pola pikir masyarakat setempat agar sesuai perkembangan jaman. Hasibuan (2001) menyatakan pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas tertentu. Pengorganisasian sagu dimulai dari (1) pembentukan tenaga pedamping teknis, (2) Strategi kerjasama, (3) Pembentukan tim mentor dan pembentukan legal drafting pengembangan sagu

c. Pergerakan / Aktualisasi Sagu

Pengerakan merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerja sehinga program dan tujuan dapat terlaksana secara tepat guna (Syamsi, 1998). Dalam manajemen sagu, sistem pengolahan dilakukan sesuai petunjuk pemerintah dalam membimbing masyarakat khususnya dalam penggunaan teknologi. Masyarakat terus dikawal karena masih butuh waktu untuk mempelajari cara penggunaan mesin pengolah sagu. Sama halnya dengan kajian Gaspersz (2020) bahwa masyarakat di Desa Porto juga menyediakan teknologi tepat guna untuk menghasilkan empulur sagu yang halus. Sepanjang edukasi masyarakat, pemerintah memberikan siraman ilmu tentunya masyarakat mengikuti prosedur pembuatan sagu mulai dari pangan, pembuatan atap rumah, dan lain-lain. Sama halnya dengan kajian Irnawati (2021) bahwa pengolahan di Kampung Puragi Papua Barat masih sederhana dan tradisionil, sehingga potensi hutan sagu masih banyak yag bisa digarap.

d. Pengawasan Sagu

Pengawasan sagu dimaknai sebagai evaluasi hasil pengolahan sagu secara maksimal dengan memperhitungkan segala kendala dan dukungan yang optimal dalam pembuatan sagu. Handayaningrat (2007) menyatakan pengawasan adalah usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai untuk menghindari segala penyelewengan yang kemungkinan terjadi. Permasalahan di Kampung Simporo, antara dinas terkait sangat lemah komunikasi

efektif nya sehingga pembinaan terbentur pada kurang solidnya pemerintah daerah selaku pembina teknis.

Dari gambaran permasalahan internal dan eksternal di atas, tentu menjadi acuan bagi kita khususnya pemerintah Kabupaten Jayapura dalam upaya mengembangkan potensi sagu. Dimana telah banyak program kebijakan yang sudah diturunkan dan didukung dengan sumber pembiayaan yang jelas seperti dari APBD maupun APBN namun belum nampak hasil yang didapat dari pengolahan sagu di Kampung Simporo. Apalagi di era Otonomi Khusus yang memberikan kewenangan yang begitu besar bagi Pemerintah dan Masyarakat Papua untuk bangkit dari keterpurukan secara sosial ekonomi yang selama ini membelenggu kreativitas masyarakat setempat.

Kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat pengelola ditempuh melalui transfer knowledge, manajemen profesional mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengawasan. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor internal yang berpengaruh melalui matriks IFAS. Matrik IFAS digunakan untuk menganalisis faktor internal yang dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Matriks IFAS Kabupaten Jayapura

Fakor Strategis Internal	**Bobot**	**Rating**	**Nilai**
Kekuatan (S) :			
1. Memiliki potensi hutan sagu	0.100	4	0,40
2. Memiliki Kebijakan pemberdayaan masyarakat	0,102	4	0,408
3. Sagu memiliki nilai social budaya	0.078	3	0,234
4. Sagu sebagai sumber pendapatan masyarakat	0,079	3	0,237
5. Pohon sagu memiliki banyak manfaat ekonomi	0,075	2	0,150
Sub Total	0,434	16	1,429
Kelemahan (W) :			
1. Pengelolaan sagu masih tradisionil	0,089	4	0,356
2. Kurangnya pendampingan bagi masyarakat pengelola sagu	0,087	4	0,348
3. Kurangnya pembinaan dan pelatihan	0,084	3	0,252
4. Kesulitan mendapatkan modal usaha	0,082	3	0,246
5. Kurangnya penganekagaman produk berbahan dasar sagu	0,079	3	0,237
6. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan	0,074	3	0,222
7 Terbatasnya alat pengolah sagu	0,071	2	0,142
Sub total	0,566	22	1,803
Total	1	38	3,232

Sumber : Data Lapangan, 2018

Sementara itu dari sisi faktor eksternal juga teridentifikasi sebanyak 11 (sebelas) faktor ekstenal yang terdiri atas 6 (enam) peluang (*Opportunities*) dan 5 (lima) ancaman (*Threats*). Adapun faktor Peluang yang teridentifikasi adalah: 1). Memiliki potensi pasar/eksport, lain halnya kegagalan pengolahan sagu di Tidore menurut kajian (N, 2012) dikarenakan akses pasar kurang sebagai objek pemasaran; 2). Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2000 tentang Pelestarian Kawasan Hutan Sagu; 3). Memiliki Kebijakan program pemberdayaan masyarakat; 4).Dukungan BPPTP dan Balitbangda (Kabupaten dan Provinsi); 5). Dukungan modal usaha dari perbankan; dan 6).Pengembangan budidaya pohon sagu. Sedangkan faktor ancaman yang teridentifikasi meliputi: 1). Sagu bukan komoditas unggulan;2).Bantuan mesin pengolah sagu tidak sesuai kebutuhan masyarakat; 3).Kebijakan beras untuk rakyat miskin (Raskin); 4). Lemahnya koordinasi antar lembaga;dan 5). Konversi lahan sagu cenderung meningkat.

Selanjutnya dari hasil identifikasi terhadap faktor eksternal dari permasalahan kebijakan pemberdayaan masyarakat adat pengelola hutan adat di Kabupaten Jayapura . Sebagaimana uraian di atas, maka sebagai upaya untuk mengeidentifikasi permasalahan lebih jauh terkait identifikasi permasalahan, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh di Kabupaten Jayapura melalui pembobotan, rating dan nilai dalam matriks EFAS yang dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Matriks EFAS Kabupaten Jayapura

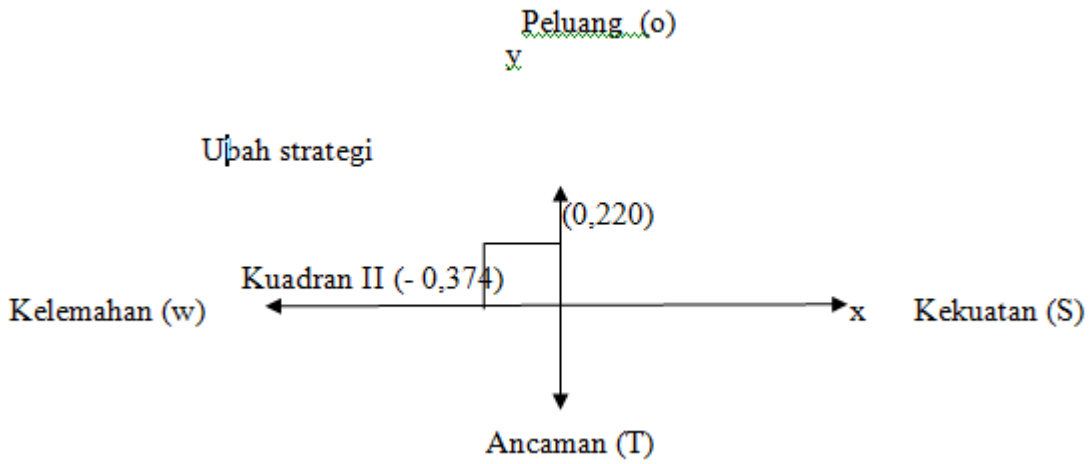
Faktor Strategis Eksternal		Bobot	Rating	Nilai
Peluang (O) :				
1.	Memiliki potensi pasar/eksport yang besar	0,089	4	0,356
2.	Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2000 tentang Pelestarian Kawasan Hutan Sagu	0,087	4	0,348
3.	Memiliki Kebijakan program pemberdayaan masyarakat	0,086	4	0,344
4.	Dukungan BPPTP dan Balitbangda (Kabupaten dan Provinsi)	0,083	3	0,249
5.	Dukungan modal usaha dari perbankan	0,079	3	0,237
6.	Pengembangan budidaya pohon sagu	0,072	2	0,144
Sub Total		0,496	19	1,672
Ancaman (T) :				
1.	Sagu bukan komoditas unggulan	0,109	4	0,436
2.	Bantuan mesin pengolah sagu tidak sesuai kebutuhan masyarakat	0,107	3	0,321
3.	Kebijakan beras untuk rakyat miskin (Raskin)	0,101	3	0,303
4.	Lemahnya koordinasi antar lembaga	0,099	2	0,198

5. Konversi lahan sagu cenderung meningkat	0,097	2	0,194
Sub total	0,516	18	1,452
Total	1	39	3,208

Sumber : Data Lapangan, 2018

Berdasarkan hasil analisis faktor internal di kabupaten Jayapura, dengan menggunakan matriks faktor strategis internal (*Internal Strategic Faktors Analysis Summary*/IFAS) dan analisis faktor eksternal menggunakan matriks faktor strategis eksternal (*External Strategic Faktors Analysis Summary*/ EFAS). Penentuan nilai bobot, rating dan perumusan strategi kebijakan juga dilakukan melalui diskusi dengan para pelaksana program di Kabupaten Jayapura. Berdasarkan hasil analisis IFAS,faktor kekuatan (*Strenghts*) mempunyai nilai sebesar 1,429 dan kelemahan (*Weakness*) mempunyai nilai sebesar 1,803. Berdasarkan hasil perhitungan dari faktor lingkungan internal, yaitu faktor kekuatan (*strenght*) dikurangi dengan faktor kelemahan (*weakness*) diperoleh nilai dari X sebagai sumbu horizontal yaitu : 1,429 – 1,803 = - 0,374. Dengan demikian maka nilai sumbu X dalam diagram SWOT adalah sebesar -0,374. Sementara itu, dari hasil analisis EFAS diketahui faktor peluang (*Opportunities*) mempunyai nilai sebesar 1,672 dan ancaman (*Threats*) mempunyai nilai sebesa 1,452. Adapun nilai pada sumbu Y sebagai sumbu vertikal adalah 1,672 – 1,452 = 0,220. Dengan demikian, nilai sumbu Y dalam diagram SWOT adalah 0,220. Hasil perhitungan matriks IFAS dan matrik EFAS menghasilkan nilai sumbu X sebesar -0,374 dan nilai sumbu Y sebesar 0,220 maka posisi strategi kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat pengelola sagu di Kabupaten Jayapura pada pemetaan analisis lingkungan strategis internal dan eksternal berada pada kuadran ketiga (III) atau pada posisi ubah strategi atau pada posisi strategi W-O, artinya dalam implementasi kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat pengelola sagu di kabupaten Jayapura disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya, sebab strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada, sekaligus untuk memperbaiki kinerja atau kebijakan yang sudah ada. Dari hasil analisis diatas maka dapat terlihat posisi grafik kuadran kabupaten Jayapura sebagai berikut :

Gambar 1. Posisi Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pengelola Sagu



Dari semua faktor yang terpilih dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi kebijakan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat di Kabupaten Jayapura (Kampung Simporo dan Yoboi), yang terdiri atas faktor-faktor utama kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T), maka disusunlah rumusan strategi kebijakan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat dengan menggunakan 4 (empat) strategi, yaitu strategi S-O, startegi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T yang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Penyusunan Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pengelola Sagu Di Kabupaten Jayapura

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (S):**	**Kelemahan (W):**
	1. Memiliki potensi hutan sagu	1. Pengelolaan sagu masih tradisionil
	2. Memiliki Kebijakan pemberdayaan masyarakat	2. Kurangnya pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat pengelola sagu
	3. Sagu memiliki nilai social budaya	3. Pola konsumsi masyarakat yang sudah berubah
	4. Sagu sebagai sumber pendapatan masyarakat	4. Kesulitan mendapatkan modal usaha
	5. Pohon sagu memiliki banyak manfaat ekonomi	5. Kurangnya penganekagaman produk berbahan dasar sagu
		6. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan

		7. Terbatasnya alat pengolah sagu
Peluang (O) :	**Strategi S-O :**	**Strategi W-O :**
1. Memiliki potensi pasar/eksport yang besar	1. Pengembangan dan pengelolaan potensi sagu ke pasar eksport	1. Program-program pembedayaan masyarakat diarahkan ke pembinaan dan pendampingan untuk masyarakat pengelola sagu
2. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2000 tentang Pelestarian Kawasan Hutan Sagu	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sagu imelalui program budidaya pohon sagu	2. Pengembangan teknologi pengelolaan sagu disesuaikan dengan nilai kearifan lokal masyarakat
3. Memiliki Kebijakan program pemberdayaan masyarakat		
4. Dukungan BPPTP dan Balitbangda (Kabupaten dan Provinsi)		
5. Dukungan modal usaha dari perbankan		
6. Pengembangan budidaya pohon sagu		
Ancaman (T) :	**Strategi S-T:**	**Strategi W-T:**
1. Sagu bukan komoditas unggulan	1. Menetapkan sagu sebagai salah satu komoditas unggulan	1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor
2. Bantuan mesin pengolah sagu tidak sesuai kebutuhan masyarakat	2. Mengembalikan pola konsumsi masyarakat ke makanan berbahan dasar sagu	2. Masyarakat adat dilibatkan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan
3. Kebijakan pembagian beras untuk rakyat miskin (Raskin)		
4. Lemahnya koordinasi antar lembaga		
5. Konversi lahan sagu cenderung meningkat		

Sumber : Data Lapangan, 2018

Berdasarkan hasil analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dengan menggunakan analisis SWOT, diperoleh alternatif-alternatif strategi pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat di Kabupaten Jayapura sebagai berikut :

1. Strategi S-O (Kekuatan dan Peluang)
   Strategi yang bersumber dari *Strenghts* dan *Opportunities* ini merupakan strategi yang diciptakan dengan menggunakan kekuatan yang bersumber dari lingkungan internal untuk memanfaatkan peluang dari lingkungan eksternal dalam

memberdayakan masyarakat adat di kabupaten Jayapura. Strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan dan pengelolaan potensi sagu ke pasar eksport
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sagu imelalui program budidaya pohon sagu

2. Strategi S – T (Kekuatan dan Ancaman)

   Strategi yang bersumber dari *Strenghts* dan *Threats* ini merupakan sebuah strategi yang diciptakan dengan menggunakan kekuatan yang bersumber dari lingkungan internal untuk mengatasi ancaman dari lingkungan eksternal dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat di kabupaten Jayapura. Strategi yang diambil adalah :

   a. Program-program pemberdayaan masyarakat diarahkan ke pembinaan dan pendampingan untuk masyarakat pengelola sagu. Kajian (Damanik I, 2013) menyatakan bahwa penguatan kapasitas diri diprioritaskan untuk peningkatan kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah, mencari dan memanfaatkan peluang serta menyusun perencanaan usaha; sedangkan penguatan kapasitas usaha terutama ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyediakan teknologi, tenaga kerja, dan modal usaha. Artinya bahwa untuk merubah potensi masyarakat, terlebih dahulu masyarakat harus mengenali dirinya sendiri dan memiliki perencanaan usaha yang matang.
   b. Pengembangan teknologi pengelolaan sagu disesuaikan dengan nilai kearifan lokal masyarakat

3. Strategi W – O (Kelemahan- Peluang)

   Strategi yang bersumber dari *Weakness dan Opportunities* ini merupakan sebuah strategi yang diciptakan dengan meminimalkan kelemahan yang bersumber dari lingkungan internal untuk mengambil peluang dari lingkungan eksternal dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat di Kabupaten Kepulauan Jayapura. Strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

   a. Menetapkan sagu sebagai salah satu komoditas unggulan
   b. Mengembalikan pola konsumsi masyarakat ke makanan berbahan dasar sagu. Anggapan selama ini sagu dianggap makanan orang miskin, masyarakat yang mengkonsumsi sagu adalah masyarakat yang kurang mampu karena sagu dianggap sebagai makanan kedua setelah beras (Hamid, Umrah Muh Rasyid Ridha, 2019)

4. Strategi W – T (Kelemahan-Ancaman)

   Strategi yang bersumber dari *Weakness* dan *Threats* ini merupakan sebuah strategi yang diciptakan dengan meminimalisir kelemahan yang bersumber dari lingkungan internal dan juga digunakan untuk menghindari ancaman dari lingkungan eksternal dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat di Kabupaten Jayapura. Strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

   a. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor
   b. Masyarakat adat dilibatkan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan

Penutup

Manajemen pengolahan sagu menjadi strategi dalam memaksimalkan potensi sagu. Banyak hal yang dipelajari dalam pengolahan sagu yaitu pembinaan sagu, penggunaan teknologi sagu, pemahaman materi pengolahan sagu, mengali kreativitas pengolahan sagu, dan membangun kerjasama. Manajemen pengolahan sagu bukanlah manajemen yang mempelajari bagaimana sagu diolah, tetapi terpenting adalah bagaimana sagu dapat berjalan dari tahun ke tahun. Sagu bermacam rupa mulai dari jenis dan varian. Semuanya tergantung pada daya berfikir serta mengolah secara baik dan tepat .Dari hasil analisa data dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dihadapi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut Pertama Manajemen perencanaan sagu dilakukan dengan menetapkan sagu sebagai komoditas unggulan daerah, pelibatan masyarakat dalam perencanaan sagu, perencanaan tim pedamping dan penyuluh serta penataan hutan sagu, Kedua pengorganisasian dilakukan dengan cara (1) penetapan tenaga pedamping teknis sesuai kompetensi, (2) memperkuat strategi kerjasama, (3) Membentuk tutor dan pembentukan tim hukum sebagai langkah menyusun naskah akademis terkait keberlanjutan potensi daerah khususnya sagu. Ketiga, pergerakan dalam mengolah sagu dimulai dengan menyusun petunjuk teknis atau buku panduan dalam mengolah sagu. Buku panduan ini menjadi catatan serta kebangkitan dalam membangun sagu agar bertahan di masa mendatang. Keempat, pengawasan dilakukan dengan memperkuat kolaborasi antara pihak pemerintah khususnya adalah pengawasan dalam pemasaran, pengawasan dalam penataan sagu, dan pengawasan permodalan.

Hasil analisis SWOT menunjukan bahwa posisi grafik pemetaan analisis sumbu X sebesar -0,374(negative) dan sumbu Y sebesar 0,220 (positif), sehingga posisi kebijakan berada pada kuadran ketiga (III) dan berada posisi ubah strategi atau disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya yang diangap belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditujukan agar peluang yang ada dapat tertangkap oleh para pengolah sagu sehingga kemungkinan berkembangnya akan mudah tercapai.

Saran atau rekomendasi dari kegiatan penelitian ini sebagai upaya mendukung kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat pengolah sagu di Kampung Simporo adalah sebagai berikut (1) Pengembangan dan pengelolaan potensi sagu sebaiknya diarahkan ke pasar eksport, karena tingkat permintaan sagu sudah sangat baik, (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sagu melalui program budidaya pohon sagu, potensi sagu ada dianggap belum maksimal karena merupakan hutan sagu yang tumbuh secara liar tanpa ada perawatan, (3) Program-program pemberdayaan masyarakat diarahkan ke pembinaan dan

pendampingan untuk masyarakat pengelola sagu, (4) Pengembangan teknologi pengelolaan sagu disesuaikan dengan nilai kearifan lokal masyarakat, (5) Menetapkan sagu sebagai salah satu komoditas unggulan, karena ternyata sagu belum ditetapkan sebagai salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jayapura, (6) Mengembalikan pola konsumsi masyarakat ke makanan berbahan dasar sagu sebagai dampak dari meningkatnya bantuan beras miskin dan pola konsumsi masyarakat yang sudah beralih ke konsumsi beras, (7) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor sebagai upaya mengembangkan konsep tanam, olah, petik dan jual, (8) Masyarakat adat dilibatkan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan.

Daftar Pustaka

Adrianto, S. A. (2018, Oktober). Manajemen Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 3, 226 -238. Retrieved April 27, 2022

Azizah, N. (2012, Oktober). Analisis Strategi Pemasaran Sagu Kasbi Pada Gapoktan Prima Jaya di Kelurahan Jaya Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan (Agrikan UMMU-Ternate), Vol 5 edisi 2, 83-92. Retrieved Agustus 16, 2020, from file:///C:/Users/Bidang%20SDM/Downloads/144-312-1-SM.pdf

Bank, W. (2011). Local Economic Development. Washington D.C: Urban Development Unit.

Bintoro, H. (2016, Mei 24). Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Lewat Sagu. (H. Aco, Ed.) Retrieved Agustus 7, 2020, from https: //www. tribunnews.com / bisnis / 2016/ 05/ 24/ mewujudkan-ketahanan-pangan-nasional-lewat-sagu.: https://www.tribunnews.com /bisnis /2016/05/24/mewujudkan-ketahanan-pangan-nasional-lewat-sagu.

Damanik, I. (2013, Mei). Strategi Penguatan Kapasitas Pengolah Sagu . Jurnal Agro Ekonomi, Vol 31 No. 1, 37-51. Retrieved Mei 2020, from https :// media. neliti.com /media/publications/96075-ID-strategi-penguatan-kapasitas-pengolah-sa.pdf,

Gasperz, N. E. (2020). Penerapan TeknologiPengolahan Sagu Untuk Meningkatkan Produksi Sagu Merah Putih di Desa Porto. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 4 No.2(978-623-90328-7-6), 70 - 77. doi:https://doi.org/10.25077/logista.4.2

Hamid, Umrah Muh Rasyid Ridha, Muh. Saleh madjid. (2019, Juli - September). Pengolahan Sagu di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, Vol 6 No.3, 109-122. Retrieved Agustus 7, 2020, from file:///C:/Users/Bidang%20SDM/Downloads/10551-25713-1-PB.pdf

Hasibuan. (2001). Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.

Ibnu, S. (1998). Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen. Jakarta: Bina Aksara.

Irnawati. (2021). Pelatihan Penolahan Sagu di Hutan secara Tradisionil untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi Masyarakat Kampung Puragi Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat. SNPPM-3 (Seminar Nasional Pemeliharaan dan Pengabdian Kepada Masyarakat(978-623-90328-7-6), 179 - 184.

M. Luhukay, R.G. Risamaul, Tomasoa. (2019, Oktober). Kajian Potensi Sagu Sebagai SUmber Pangan Lokal di Negeri Tuhaha Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah. Agrinimal, Vol 7 No.2, 64-68. doi:https://doi.org/10/30598/ajitt.2019.7.2.64-68

Mamun Murod, Cecep Kusmana, Mohammad HAsjim Bintoro, Widiatmaka, Endang Hilmi. (2018, Desember). Analisis Struktur Kendala dalam Pengelolaan Sagu Berkelanjutan di kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Buletin Palma, Vol 19 No.2, 101-116. Retrieved Agustus 7, 2020, from file:///C:/Users/Bidang%20SDM/Downloads/9437-32284-1-PB.pdf

Santoso, A. D. (2017, Desember). Potensi Dan Kendala Pengembangan Sagu Sebagai Bahan Pakan, Pangan, Energi Dan Kelestarian Lingkungan Di Indonesia. JRL, Vol 10 No.2, 51-57. Retrieved Agustus 15, 2020, from file:///C:/Users/Bidang%20SDM/Downloads/2852-Article%20Text-5856-1-10-20180402%20(2).pdf

Sarni. (2020). Pengaruh Nilai Tambah dan Efisiensi Pemasaran Sagu Terhadap Pendapatan Pengolah Sagu di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia. Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian (JIMDP), Vol 5 No.1, 19-26. doi:http://dx.doi.org/10.37149/JIMDP.v5i1.10019

Siagian, S. (2012). Fungsi-Fungsi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

Tahitu, M. (2016). Strategi Pengembangan Pengelola Sagu di Maluku Tengah Provinsi Maluku. Jurnal Sosiohumaniora, Vol 18 No 1, 39-46. doi:https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i1.9356,

Tempo. (2016, Juni 8). Hutan Sagu, Kunci Kesejahteraan Indonesia Bagian Timur. Retrieved Agustus 8, 2020, from https://bisnis.tempo.co/read/777823/hutan-sagu-kunci-kesejahteraan-indonesia-bagian-timur/full&view=ok: https:// bisnis.tempo.co /read/ 777823/ hutan-sagu-kunci-kesejahteraan-indonesia-bagian-timur/full&view=ok